

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, S. (1998). *Prosedur Pendaftaran Tanah Hak Milik, Hak Sewa Bangunan, Hak Guna Bangunan*. Rineka Cipta.
- Arban, H. M. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bakrie, M. (2011). *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria)*. UB Press.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*. Unpam Press.
- Effendie, B. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni.
- Erwin, M. (2011). *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan.
- _____. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hartanto, A. (2009). *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*. Laksbang Mediatama.
- Hasni. (2008). *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah*. Rajagrafindo Persada.
- Hermit, H. (2004). *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Prenada Media.

- Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum. Alumni.
- Korompis, S. A. (2018). Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Vi*(1), 20–26.
- Kusumaatmadja, M. (1970). Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Jilid III. Majalah Pajajaran.
- Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi enam. Liberty.
- Parlindungan, A. P. (2008). Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Mandar Maju.
- Paramita, J. P. (2013). Politik Hukum di Bidang Pendaftaran Tanah, Dalam Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan. Graha Ilmu.
- Prakoso, A. (2016). Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum. Laksbang Pressindo.
- Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Pressindo.
- Saleh, I. (1983). Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai dengan Akhir Abad-19. Museum Lambung Mangkurat.
- Santoso, U. (2015). Kiat Menyusun Proposal Penelitian. Graha Ilmu.
- _____. (2010). Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (1st Ed.). Prenada Media Group.
- Setiabudi, J. (2012). Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah Serta Segala Perizinannya. Suka Buku.
- Soekanto, S. (1983). Penegakan Hukum. Bina Cipta.

- Supriyadi. (2010). *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Eksistensi Tanah Aset Daerah*. Prestasi Pusaka.
- Subekti. (1991). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Sumardjono, M. S. W. (2009). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas.
- Sutedi, A. (2006). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2012). *Sertifikat Hak atas Tanah*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Praktek*. Sinar Grafika.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. UNG Press.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum (K. Nw (Ed.); 1st Ed.)*. Lakkas.
- Yustia, R. D. A., Rachmi, S. (2021). *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*. Fakultas Hukum Unpas.
- Zulaeha, I., Doyin, M., Wagiran. (2016). *Pengantar Penulisan Karya Ilmiah*. Unnes Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32)

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai Dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 31)

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perumahan di Kota Banjarmasin

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor 2A Tahun 2011 tentang Besaran Ganti Rugi Tanah Sesuai Dengan Bukti Hak Atas Tanah Bagi Pemilik Tanah Yang Terkena Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

C. Jurnal dan Sumber Hukum Lain

- Adawiyah, R. (2022). Kepastian Hukum Hak Kepemilikan atas Tanah yang Berasal dari Proses Pengendapan Arus Sungai (*Delta*) dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(1), 76-82.
- Apriyani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 222-237. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-21.
- Korompis, S. A. (2018). Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Privatum*, 6(1), 20-25.
- Mentayani, I. (2019). Identitas Dan Eksistensi Permukiman Tepi Sungai Di Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 4(3), 497-502.
- Muhlis, A., & Darmawani. (2013). Identifikasi dan Problematika Penggunaan Lahan Lingkungan Bantaran Sungai Terhadap Peraturan Pemerintah Dan Daerah Di Kota Banjarmasin. *Poros Teknik*, 5(2), 61-67.
- Nurfansyah. (2008). *Settlement Pattern Model at Riverside (A Case Study of Martapura River)*. *Info-Teknik*, 9(2), 165-168.
- Prakoso, B. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Journal Of Private And Economic Law*, 1(1), 63-82.

- Rasa, W. P., Subarsyah., & Sumantry, D. (2021). *Legal Properties of Indemnity as Prevention of Ownership and Implementation of Conversion of Land Rights Based on Law Number 5 Year 1960 Concerning Agrary Basics. International Journal of Latin Notary, 1(2), 57-71.*
- Rochgiyanti. (2011). Fungsi Sungai Bagi Masyarakat Di Tepian Sungai Kuin Kota Banjarmasin. *Jurnal Komunitas, 3(1), 51-59.*
- Safitri, F. A., ALW, L. T., Lumbanraja, A. D. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah di Kota Semarang. *Notarius, 13(2), 794-796.*
- Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum, 2(2), 297-304.*
- Tharziansyah, M. (2011). Karakteristik Bermukim Masyarakat Banjar Pinggiran Sungai Studi Kasus: Kelurahan Kuin Utara Banjarmasin. *Poros Teknik, 3(1), 1-6.*
- Ulimaz, M., Achmad, S. R., & Rahayu, U. (2018). Potensi Rumah Nelayan Sebagai Prioritas Rumah Khusus di Kabupaten Banjar. *Jurnal Planoeearth, 3(2), 49.*
- Widianugraha, P. (2019). Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(2), 208–223.*
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17>
- Wulandari, F., Aina, N., & Razak, H. (2019). Potensi Budaya Pada Kawasan Permukiman Tepian Sungai Studi Kasus Kelurahan Seberang Masjid

Banjarmasin. *NALARs Jurnal Arsitektur*, 18(1), 57-64.

<https://doi.org/10.24853/nalars.18.1.57-64>